

# PENGARUH KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL DAERAH TERHADAP PELAYANAN PDAM TIRTA INDRAGIRI DI TEMBILAHAN

Oleh :

**Oktaria Nita**

Email: [oktarianita10@yahoo.com](mailto:oktarianita10@yahoo.com)

**Pembimbing: Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si**

Program Studi Administrasi Publik

Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5

Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

*This study aims to analyze the influence of local government capital investment policy toward water supply company (pdam) services in tembilahan. The formulation of problem in this thesis is How the Influence of Local Government Capital Investment Policy Toward Water Supply Company (PDAM) Tirta Indragiri Services. The purpose of this research is in order to know about is there any influence of capital investment toward PDAM services, how much influence of capital investment toward PDAM services in Tembilahan, and how the influence of capital investment toward PDAM Tirta Indragiri services in Tembilahan. This research indicates that there is a positive and significant influence between capital investment and PDAM services in Tembilahan It means there is a relationship between capital investment variable (X) and PDAM services variable (Y).*

*Keywords: Capital Investment, Local Government, and PDAM Tirta Indragiri services*

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berasal dari air yang ada dipermukaan bumi antara lain aliran-aliran sungai, rawa maupun danau. Dalam pengelolaan sumber daya air dibutuhkan kegiatan studi pengembangan sumber daya air sesuai dengan kebutuhan. Umumnya perkiraan ketersediaan air dilakukan berdasarkan pencatatan data debit sumber air yang berkesinambungan dan panjang. Akan tetapi, di Indonesia pada umumnya data tersebut tidaklah panjang. Melihat kondisi yang seperti itu maka dibutuhkan

suatu model yang dapat mensimulasikan data hujan dan iklim menjadi data debit. Penyediaan air bersih di Indonesia selama ini dilakukan oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

Hasil dari kinerja PDAM yang berstatus sakit di Pulau Sumatera, masih terdapat 32 PDAM yang mengalami sakit. Hal ini membuat pelayanan air bersih ke masyarakat belum merata dengan kata lain pelayanan yang diberikan belum maksimal. Salah satu PDAM yang mengalami kerugian besar dan berstatus sakit yaitu **PDAM yang terletak di Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir “PDAM Tirta Indragiri”**.

Pada akhir Desember 2015, Pemerintah Kabupaten dengan ini telah membuat kebijakan agar PDAM tetap

memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yakni “Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri” yang mengatur tentang mekanisme pencairan dana untuk penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Indragiri Hilir pada tanggal 28 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H.M. Wardan dan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir H. Fauzar.

Pada saat observasi di lapangan, ditemukan apabila pelaksanaan dari Kebijakan Penyertaan Modal Daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri ini sudah berjalan sesuai yang telah dibuat yakni pencairan dana sebesar Rp.5.000.000.000,00. Akan tetapi apabila dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan PDAM pasti akan berdampak baik terhadap pelayanan yang diberikan PDAM kepada pelanggannya. Tetapi penulis menemukan adanya pelayanan PDAM yang belum efektif kepada masyarakat di Tembilahan. Maka dari itu, penulis ingin meneliti sejauh mana pengaruh kebijakan penyertaan modal daerah terhadap pelayanan PDAM Tirta Indragiri di Tembilahan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Indragiri ?
2. Bagaimana pelayanan PDAM Tirta Indragiri di Tembilahan ?
3. Bagaimana pengaruh penyertaan modal daerah terhadap pelayanan PDAM Tirta Indragiri di Tembilahan ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Indragiri.
2. Untuk mengetahui pelayanan PDAM Tirta Indragiri di Tembilahan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penyertaan modal daerah terhadap pelayanan PDAM Tirta Indragiri di Tembilahan.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk menjadi media pengembangan diri dan wawasan bagi peneliti.
  - b. Untuk menjadi pengembangan ilmu khususnya dibidang kebijakan publik Adiministrasi Publik
  - c. Untuk menjadi bahan referensi perpustakaan bagi peneliti yang mengarah pada permasalahan yang sama.

### **2. Manfaat praktis**

Untuk menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan agar kebijakan atau program yang dilaksanakan dapat lebih maksimal.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kebijakan Publik**

Sebelum membahas penyertaan modal daerah ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu tentang konsep kebijakan, hal ini mengingat penyertaan modal daerah merupakan suatu kebijakan pemerintah. Menurut **Laswell dan Kaplan dalam Santosa**

(2009:27) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*) adalah proyek, nilai, dan praktek. Sementara itu menurut **Anderson dalam Hamdi (2014:36)** mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh **Dye dalam Subarsono (2005:2)** bahwa "*public policy is whatever government choose to do or not to do*" artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Ia mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan yang objektif dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah. Sesuatu tidak dilaksanakan oleh pemerintah akan mempunyai dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

**Syafiie (2006:104)**, mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknyadibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefenisikan kebijakan public adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

## 2. Implementasi Kebijakan

**Edward III dalam Arifin Tahir (2015:61)** mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan public dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan public.

Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980;10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

### 1. Faktor Komunikasi

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten

### 2. Faktor Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup relevan

tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan, tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bias efektif.

### 3. Faktor Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan public. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka

juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

### 4. Faktor Struktur Organisasi

Para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginandan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani. Asal usul karakteristik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, menyebabkan tindakan kebijakan pada maksud yang berlawanan, dan sebab beberapa kebijakan yang gagal.

### 3. Pelayanan Publik

Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Asas pelayanan publik adalah: **(Tjandra dkk, 2005:11)**.

#### 1. Transparan

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

#### 2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 3. Kondisional.

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif  
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak  
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama gender dan status ekonomi.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

## **E. HIPOTESIS**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris. (Sugiyono, 2002:39)

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mengajukan suatu hipotesis yang dilandaskan pada teori yang relevan.

Hipotesisnya, yaitu:

Ha “Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kebijakan penyertaan modal daerah terhadap pelayanan PDAM Tirta Indragiri.”

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif dengan

menggunakan metode kuantitatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala dalam penelitian (dalam Syofian Siregar, 2015:15).

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Riau tepatnya berada di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah dikarenakan berdasarkan data BPPSPAM Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, salah satu PDAM yang sedang mengalami kerugian atau sedang “sakit” salah satunya yaitu PDAM Tirta Indragiri yang terletak di Jalan M Boya nomor 17 Tembilahan.

### **3. Populasi dan Sampel**

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2002:57). yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah melakukan pelayanan di PDAM Tirta Indragiri yakni pelanggan PDAM Tirta Indragiri.
- b. Sampel  
Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel didefinisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. (dalam Nanang Martono 2011:74).

Teknik penarikan sampel untuk jumlah responden berpedoman pada pendapat **Slovin dalam Syofian Siregar (2015:61)** yang mengemukakan rumus penarikan sampel yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian pengambilan sampel (10%)

Diketahui (N) jumlah populasi sebanyak 7856 orang dan (e) persentase ketidak telitian sebesar 10%.

Maka,

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{7856}{1 + (7856(10\%)^2)}$$
$$n = \frac{7856}{79,56}$$
$$n = 98,74$$

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 98,74 orang dibulatkan menjadi 99 orang pelanggan yang melakukan pelayanan PDAM Tirta Indragiri di Tembilahan.

#### 4. Sumber data

- a. Data primer : adalah merupakan data hasil dari kuisioner/angket yang disebar di lokasi penelitian atau dalam hal ini dilakukan di Tembilahan maupun sekitarnya. Dimana respondennya adalah pelanggan PDAM Tirta Indragiri Tembilahan.
- b. Data sekunder : adalah data yang sudah jadi atau data yang diperoleh melalui berbagai

informasi dari instansi terkait. Seperti, struktur organisasi, jumlah pelanggan, dan tugas pokok dari masing-masing bagian.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Untuk pengumpulan data yang valid, akurat dan lengkap maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

##### a. Observasi

Pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dilakukan, untuk melihat langsung pelaksanaan pelayanan publik khususnya dalam bidang seksi pemerintahan.

##### b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan berstruktur dan tidak berstruktur secara langsung terhadap informan dan jawaban yang diberikan akan dianalisa untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan penyertaan modal daerah terhadap pemberian pelayanan. Teknik pengumpulan data wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari pemberi pelayanan yakni Kepala Badan Sekretariat Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepala Seksi PDAM Tirta Indragiri beserta staff

##### c. Questioner

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebar pertanyaan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan model terbuka berdasarkan variabel pengukuran yang diberikan kepada seluruh responden guna memperoleh informasi dan data

yang diinginkan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan questioner ini digunakan untuk pengambilan data ini dari penerima pelayanan, yaitu pelanggan PDAM Tirta Indragiri yang berada di Tembilahan.

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kuantitatif, kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif sesuai dengan jenis dan macam data tersebut diperlukan, kemudian barulah data tersebut disajikan melalui tabel-tabel yang dilengkapi dengan penjelasannya sehingga peneliti dapat menarik hipotesis.

Untuk menganalisis pengaruh penyertaan modal daerah terhadap pelayanan PDAM Tirta Indragiri maka penulis menggunakan analisis regresi linear sederhana, metode ini digunakan karena dalam penelitian ini terdapat 2(dua) variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). setelah dianalisis data yang diperoleh secara kualitatif di ubah menjadi data kuantitatif.

Proses analisa data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

### a. Deskripsi Data

Pendeskripsian data dilakukan untuk menentukan kedudukan data dalam suatu kelompok. Pendeskripsian bertujuan untuk mengungkapkan nilai maksimum dan minimum, nilai rata-rata (*mean*), *modus*, *median* dan simpangan baku (standar deviation) serta histogram kurva normal.

### b. Uji Hipotesis

## (1) Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) (variabel yang mempengaruhi) dengan Variabel (Y) (Variabel yang dipengaruhi) penulis menggunakan analisis regresi linear sederhana dan diproses dengan menggunakan *Statistic Product and Service Solution (SPSS) for Windows Release 20*, adapun persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta x$$

**Sumber: Sugiyono, 2012)**

Y=Variabel Terikat (Pelayanan)

X=Variabel Bebas (Penyertaan Modal Daerah)

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien regresi

untuk menentukan nilai a dan b maka dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum XY - (\sum X^2)}$$

$$b = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - (\sum X^2)}$$

## (2) Keberartian Koefisien Korelasi

Untuk menguji keberartian koefisien korelasi  $r_1$  dapat diuji dengan menggunakan uji t dengan rumus yang dikemukakan **Riduan (2007:160)**

$$T_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

$T_{hitung}$  = nilai t hitung

r = koefisien korelasi

n = jumlah responden atau sampel

jika  $t_{hitung}$  besar dari pada  $t_{tabel}$  lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  dengan signifikan 95% maka hipotesis ditolak.

## G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Normalitas data

Analisis uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji asumsi bahwa distribusi sampel dari rata-rata sampel mendekati atau mengikuti normalitas populasi. Pengujian normalitas penyebaran skor atau data dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 20 pada *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Kriteria pengujian normalitas yang digunakan adalah jika harga *Asymp. Sig (2-Tailed)* kecil dari probabilitas yang diperoleh  $> 0,05$ , maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal dan jika harga *Asymp. Sig (2-Tailed)* kecil dari probabilitas yang diperoleh  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.

### 2. Uji Linearitas Data

Pengujian linearitas dilakukan untuk melihat apakah masing-masing data Penyertaan modal daerah (X) membentuk distribusi garis linear terhadap efektifitas pelayanan PDAM Tirta Indragiri (Y). Untuk mengetahui apakah persamaan regresi antara variabel bebas (X) bersifat linear atau tidak.

### 3. Uji Hipotesis

#### 1) Uji Regresi Liner Sederhana

Uji regresi sederhana merupakan pengujian keterkaitan antara dua variabel yaitu antara variabel penyertaan modal daerah (X) dengan pelayanan PDAM Tirta Indragiri (Y). Pengujian hubungan ini dimaksudkan dalam menentukan besar pengaruh yang diberikan oleh variabel penyertaan modal daerah (X) dengan pelayanan PDAM Tirta Indragiri (Y). Berdasarkan pengujian data yang diperoleh maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan data pengumpulan angket penelitian yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengolahan data dengan uji linearitas sederhana maka diperoleh hasil sebagai berikut:

### Pengaruh Penyertaan modal daerah Terhadap Pelayanan PDAM Tirta Indragiri

Variabel	Koefisien Regresi (B)	Probabilitas (Sig)	Keputusan Terhadap Ha
Kepijakan Penyertaan Modal Daerah	0,936	0.000	Ha diterima
R Square	0,626		
Unsquare	0,692		
Adjusted R Square	0,686		
Konstanta	15,707		
$\alpha$	0,05		

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan

bahwa tingkatan korelasi antara variabel X dan variable Y sebesar 0,626 Hal ini terjadi karena besarnya nilai korelasi atau nilai pengaruh yang dihasilkan antara penyertaan modal daerah (X) dengan pelayanan (Y) akan terlihat pada besarnya nilai R. selanjutnya untuk melihat signifikan persamaan regresi antara variabel penyertaan modal daerah (X) dengan Pelayanan PDAM Tirta Indragiri (Y) dapat dilihat dari besarnya angka yang dilibatkan pada nilai probabilitas (sig) dengan hasil 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi atau tingkatan pengaruh yang dihasilkan oleh penyertaan modal daerah (X) dengan Pelayanan PDAM Tirta Indragiri (Y) berpengaruh secara positif.

Selanjutnya untuk melihat model persamaan garis regresi yang di hasilkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai constanta yaitu sebesar 15,707 dan nilai koefisien regresi (B) penyertaan modal daerah sebesar 0,936. Dengan demikian maka persamaan garis regresinya adalah :

$$Y = 15,707 + 0,936 X$$

#### 4. Uji Determinasi

Pelaksanaan uji determinasi bertujuan untuk mengetahui besar

persentase pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel . Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel penyertaan modal daerah (X) terhadap pelayanan PDAM Tirta Indragiri (Y) menggunakan rumus koefisien determinasi yaitu:

$$P = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

P = Besarnya persentase

r = nilai koefisien korelasi

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut:

#### Uji Determinasi Penyertaan modal daerah Terhadap Efektifitas Pelayanan PDAM Tirta Indragiri

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.626	0.692	0.6

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,626. Sehingga dengan demikian maka pengaruh yang diberikan oleh variabel penyertaan modal daerah terhadap pelayanan PDAM Tirta Indragiri adalah sebesar

62,6 %. Sehingga dengan demikian pengaruh variabel penyertaan modal daerah terhadap pelayanan PDAM Tirta Indragiri tergolong dalam kategori kuat. Senentara 37,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang lain.

### **Pengaruh Penyertaan modal daerah Terhadap Efektifitas Pelayanan PDAM Tirta Indragiri**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penyertaan modal daerah dengan efektifitas pelayanan PDAM Tirta Indragiri. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh  $R_{hitung}$  sebesar 0,626 yang berarti terdapat hubungan antara variabel penyertaan modal daerah (X) dengan variabel efektifitas pelayanan PDAM Tirta Indragiri (Y), dan tingkat hubungannya adalah kuat. Dari perhitungan determinasi diketahui bahwa pengaruh penyertaan modal daerah terhadap efektifitas pelayanan publik adalah sebesar 62,6 %. Pengaruh penyertaan modal daerah terhadap efektifitas pelayanan PDAM Tirta Indragiri adalah positif yang dapat diuji melalui rumus  $Y = 15,707 + 0,936 X$ . Artinya apabila nilai variabel X (penyertaan modal daerah) dinaikkan sebanyak satu satuan, maka nilai variabel Y (efektifitas pelayanan PDAM Tirta Indragiri) akan meningkat pula.

Melihat proses penyertaan modal daerah yang dilakukan pada PDAM Tirta Indragiri telah memberikan perbaikan dalam proses pelayanan kepada konsumen. Untuk peningkatan pelayanan yang diterapkan dengan pelaksanaan penyertaan modal daerah ini memberikan sumbangan yang baik pula dalam efisiensi

pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diterima masyarakat melalui penyertaan modal ini sangat berarti bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan PDAM.

Sebelum adanya penyertaan modal daerah ini, PDAM merasa susah dalam operasional. Karena masih terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh PDAM itu sendiri. Dari penyertaan modal daerah yang diberikan kepada PDAM Tirta Indragiri memberikan kemajuan yang signifikan kepada pelaksanaan operasional PDAM dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## **H. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di PDAM Tirta Indragiri, yakni tentang “pengaruh kebijakan penyertaan modal daerah terhadap pelayanan PDAM Tirta Indragiri di Tembilahan”. dimana penulis menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penyertaan modal dengan pelayanan. Dengan demikian dari pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyertaan modal berada dalam kategoricukup baik. Hal itu dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, strukturbirokrasidandisposisi berada dalam kategori cukupbaik.
2. Pelayanan di PDAM Tirta Indragiri berada dalam kategori baik. Hal itu dapat di lihat dari tanggapan responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan indikator pelayanan yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan

hak, keseimbangan hak dan kewajiban berada dalam kategori baik.

3. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan uji statistik dengan menggunakan bantuan program *SPSS 20* terbukti bahwa, terdapat pengaruh signifikan antara pemekaran kecamatan dengan pelayanan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,626 atau dapat dikatakan mempunyai tingkat hubungan yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang “pengaruh kebijakan penyertaan modal daerah terhadap pelayanan PDAM Tirta Indragiri di Tembilahan”. maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pegawai di PDAM Tirta Indragiri Tembilahan. Meskipun sekarang ini pelayanan yang diberikan sudah mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat, tetapi sebaiknya para pegawai tidak boleh puas dengan hasil yang didapatkan. Karena masih dijumpai beberapa masyarakat yang masih mengeluh dengan pelayanan yang diberikan meskipun itu hanya beberapa orang saja.
2. Para pegawai harus mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang diberikan agar tidak adalagi satu orangpun masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan.
3. Selanjutnya mengenai penyertaan modal dari pemerintah daerah

seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh PDAM, hal ini dapat difungsikan untuk mengelola PDAM dengan baik, dan juga diharapkan dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat seharusnya para pegawai selalu mengadakan berbagai kegiatan dalam meningkatkan kemampuan dan pelayanan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Elex Media: Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Elex Media: Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Elex Media: Jakarta.
- AG Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama: Bandung.
- Purwanto, Agus, Erwan. Sulistyastuti, Ratih, Dyah. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Gava Media: Yogyakarta.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta: Bandung.
- Matono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Riduan, 2005, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta: Bandung.

Siregar Syofian. 2015, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, Bumi Aksara: Jakarta.

Sugiyono. 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alaf Riau: Pekanbaru.

Syaukani. 2002. *Kebijakan Publik: Menggapai masyarakat madani*. Meda Pustaka: Yogyakarta.

Tdjandra, W.Riawan, dkk. 2005, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Pembaharuan: Yogyakarta

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media. Pressindo: Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2012. *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Media Caps: Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Buku Seru: Jakarta.

#### **Dokumen :**

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri.

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor ... Tahun 20.. tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencairan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri

Kinerja PDAM Tahun 2015 oleh BPPSPAM